

Tinjauan Mata Kuliah

Buku ini merupakan materi untuk bahan mata kuliah **Administrasi Pemerintahan Desa/ADPU4340** yang diberikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Terbuka dengan bobot 3 (tiga) satuan kredit semester (sks). Materi dengan judul yang sama sebenarnya sudah pernah disusun oleh penulis lain dan dijadikan bahan mata kuliah pada mahasiswa UT pada fakultas yang sama untuk tahun akademik sebelum 2008. Pada tahun akademik 2009, disusun buku dengan judul sama tetapi dengan penulis yang berbeda. Tujuannya adalah agar terdapat variasi pembahasan dan kajian, mengingat setiap penulis memiliki gaya bahasa, cara pandang, pengalaman keilmuan, dan pengalaman empirik yang berbeda-beda. Dengan cara demikian, sebuah materi perkuliahan akan menjadi lebih berkembang dan dinamis.

Berangkat dari judul mata kuliah, yakni Administrasi Pemerintahan Desa, pada bagian awal modul ini membahas mengenai tinjauan ulang (*review*) administrasi dan pemerintahan desa. Tujuannya adalah agar diperoleh penyegaran ingatan dan persamaan persepsi para mahasiswa dalam mempelajari secara mandiri materi perkuliahan yang disajikan. Karena mata kuliah ini merupakan materi lanjutan, diperlukan prasyarat untuk mempelajarinya, yakni sudah memahami materi mata kuliah Organisasi dan Manajemen (O & M) serta mata kuliah Sistem Pemerintahan.

Mengingat administrasi terdiri dari organisasi dan manajemen maka uraian selanjutnya adalah membahas tentang organisasi pemerintah desa yang mencakup bentuk dan susunan, hubungan kerja serta ketatalaksanaannya. Bagian selanjutnya membahas mengenai manajemen pemerintahan desa mengikuti fungsi-fungsi manajemen, meliputi manajemen perencanaan, pembiayaan, sumber daya manusia, logistik, pengawasan, pelayanan publik, serta ditutup dengan materi yang membahas mengenai kepemimpinan. Materi tentang kepemimpinan kepala desa ditempatkan pada bagian akhir didasarkan pada pertimbangan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi, sedangkan kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Dengan perkataan lain, kepemimpinan kepala desa merupakan inti dari inti atau intisari dari administrasi pemerintahan desa. Dikatakan demikian karena keberhasilan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa akan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala desa.

Setelah mempelajari mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa yang disiapkan dalam bentuk modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan ruang lingkup administrasi pemerintahan desa, yang di dalamnya membahas mengenai organisasi dan manajemen pemerintahan desa, termasuk kaitannya dengan sistem pemerintahan supradesa yang meliputi pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. memahami dan mampu menjelaskan mengenai organisasi dan fungsi-fungsi dalam manajemen pemerintahan desa, termasuk mengenai kepemimpinan dalam pemerintahan desa;
3. melakukan analisis terhadap gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa.

Adapun bahasan materi mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa dengan bobot tiga sks terdiri dari 9 (sembilan) modul, yaitu sebagai berikut.

Modul 1 membahas Tinjauan Ulang mengenai Administrasi dan Pemerintahan Desa yang di dalamnya terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama membahas tinjauan ulang mengenai administrasi yang berbicara tentang definisi, ruang lingkup, dan bagian-bagian dari administrasi. Kegiatan belajar kedua membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup pemerintahan, kedudukan desa dan pemerintahannya dalam sistem pemerintahan NKRI, otonomi desa serta urusan pemerintahan desa.

Modul 2 membahas mengenai organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama membahas bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa. Kegiatan belajar kedua membahas mengenai hubungan kerja antara pemerintahan desa dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan belajar ketiga membahas mengenai ketatalaksanaan organisasi pemerintahan desa.

Modul 3 membahas mengenai perencanaan desa yang terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama membahas mengenai proses penyusunan perencanaan desa. Kegiatan belajar kedua membahas hubungan perencanaan desa dengan perencanaan pemerintahan supradesa (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).

Modul 4 membahas mengenai keuangan desa yang terdiri dari tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama membahas mengenai sumber-sumber pendapatan desa. Kegiatan belajar kedua membahas proses penyusunan APBDesa. Kegiatan belajar ketiga membahas mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa.

Modul 5 membahas mengenai sumber daya perangkat desa yang meliputi tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama berbicara tentang kedudukan perangkat desa dalam sistem kepegawaian negara. Kegiatan belajar kedua membahas mengenai sistem imbalan. Sedangkan kegiatan belajar ketiga membahas mengenai hubungan industrial.

Modul 6 membahas mengenai manajemen logistik dan kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa, mencakup dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama berbicara mengenai pengertian singkat tentang logistik, manajemen logistik dan logistik desa. Kegiatan belajar kedua membahas mengenai manajemen kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Modul 7 membahas manajemen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama berisi tentang definisi dan jenis-jenis pengawasan pada organisasi pemerintah. Kegiatan belajar kedua mendiskusikan mengenai mekanisme pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, baik yang dilaksanakan oleh satuan pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, oleh satuan pengawas eksternal pemerintah seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun pengawasan oleh masyarakat.

Modul 8 membahas mengenai manajemen pelayanan publik, berisi tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama membahas mengenai pengertian pelayanan publik sebagai pengantar masuk ke materi manajemen pelayanan publik. Kegiatan belajar kedua membahas mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa. Kegiatan belajar ketiga membahas mengenai pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa.

Modul 9 membahas tentang kepemimpinan kepala desa sebagai intisari dari administrasi pemerintahan desa, dengan tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama mendiskusikan mengenai teori kepemimpinan, dan jenis kepemimpinan baik organisasional maupun sosial. Kegiatan belajar kedua membahas mengenai mekanisme pemilihan kepala desa. Sedangkan kegiatan belajar ketiga membahas mengenai mekanisme pertanggungjawaban kepala desa baik secara vertikal ke atas kepada bupati/walikota sebagai kepala daerah, secara horizontal kepada BPD, maupun secara vertikal ke bawah kepada masyarakat pemilih.

Pada akhir pembelajaran materi kuliah Administrasi Pemerintahan Desa, Anda diharapkan dapat memahami serta menganalisis gejala dan peristiwa berprosesnya administrasi pemerintahan desa, sehingga Anda dapat memberi sumbangan konkret terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional.

Peta Kompetensi
Administrasi Pemerintahan Desa/ADPU4340/3 sks

